

DIIZINKANNYA MUDIK SAAT IDUL FITRI

Perlu Protokol Kesehatan Tambahan

YOGYA (KR) - Kebijakan pemerintah pusat yang membolehkan masyarakat untuk mudik pada Idul Fitri mendatang, harus diimbangi dengan kedisiplinan penegakkan prokes. Pasalnya saat Lebaran, Mei mendatang, dapat dipastikan *herd imunity* di Indonesia belum tercapai. Artinya, masih ada risiko peningkatan kasus pada bulan Juni jika tidak ada antisipasi yang efektif saat Lebaran. Jika kebijakan pemerintah tidak melarang mudik, maka di luar protokol kesehatan yang selama ini telah berjalan, perlu ada protokol kesehatan (Prokes) tambahan.

"Apabila antisipasi berfokus pada pengendalian infeksi virus pada penduduk lokal, maka yang dilakukan adalah mencegah interaksi fisik antara penduduk asli dan pendatang. Implementasinya di antaranya adalah pendatang hanya diizinkan tinggal di hotel, tidak di rumah keluarga. Dalam hal ini peran RT/RW penting untuk adanya wajib lapor," kata peneliti Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM, Dr Arif Wismadi di Yogyakarta, Minggu (21/3). Menurut Arif, selain beberapa antisipasi di atas, peringatan potensi pembawa virus di ruang publik dapat juga disiapkan dengan aplikasi berbasis bluetooth. Seperti di negara Belanda ada aplikasi Coronamelder yang mem-

berikan notifikasi ketika seseorang berada pada situasi berisiko tinggi karena berdekatan dengan orang yang diduga pembawa virus.

Jika antisipasi berfokus pada pengendalian pergerakan sumber virus maka yang dilakukan adalah mencegah bercampurnya penduduk asli dan pendatang. Di ruang publik misalnya ada pembatasan dan pemisahan area yang dapat dikunjungi pendatang. Kemudian untuk semua pengunjung dilakukan screening berlapis berdasarkan asal domisili, risiko pembawa, indikasi gejala terinfeksi. Di tiap titik screening terdapat tindakan mengarahkan pengunjung sesuai protokol baru ini.

"Dalam ruang-ruang publik yang ternyata masih menyisakan risiko in-

teraksi harus ditambahkan protokol baru cara interaksi dari sebelumnya pada pilihan interaksi fisik dan interaksi virtual, menjadi hybrid (kombinasi fisik dan virtual). Jadi misalnya di dalam toko atau rumah makan, maka meski dalam satu ruang, dengan menjaga jarak, komunikasi interaktif pengunjung dan pengelola harus menggunakan media virtual, misalnya menggunakan HP atau aplikasi smartphone," terangnya.

Lebih lanjut Arif menambahkan, supaya hasilnya bisa maksimal, selain beberapa strategi tersebut, setiap item barang atau lokasi tertentu dapat disediakan barcode untuk berkomunikasi dengan pelayanan pengunjung.

Sedangkan pengantaran barang pesanan juga tidak diserahterimakan secara fisik namun disediakan meja atau counter untuk meletakkan barang yang diserahterimakan. Apabila cara itu ditempuh, jangan lupa juga bahwa alat komunikasi/HP, harus dipastikan selalu bersih.

Sedangkan pada pelayanan makan minum hendaknya dipilah hidangan panas. Jika perlu alat pemanas seperti microwave disediakan untuk digunakan oleh pengunjung jika akan mengkonsumsi di tempat. **(Ria)-f**

Samsat Kota Yogya Raih Sertifikat ISO 9001 : 2015



KR-Haryadi

Jajaran Samsat Kota Yogyakarta, menerima sertifikat ISO 9001 : 2015 Periode Tahun 2021.

YOGYA (KR) - Samsat Kota Yogyakarta berhasil meraih Sertifikat ISO 9001 : 2015 Periode Tahun 2021, Pencapaian sertifikat tersebut tidak lepas dari kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Konsekuensi dari hasil yang dicapai tersebut, tentu ke depan Samsat Kota Yogyakarta harus mampu memberikan manfaat dan kemudahan pelayanan kepada masyarakat Yogyakarta. Selain itu, dengan diraihnya Sertifikat ISO 9001 : 2015 Periode Tahun 2021, mau tidak mau memaksa dilakukannya peningkatan yang sesuai harapan masyarakat.

Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda DIY Kombes Pol Iwan Saktiadi SIK MH MSi ketika dikonfirmasi KR, Sabtu (20/3) menyampaikan rasa syukur atas hasil yang telah dicapai tersebut. Diharapkan, dengan raihannya Sertifikat ISO 9001 : 2015 Periode Tahun 2021 bisa semakin memotivasi kerja anggotanya, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan yang dimaksud adalah soal mekanisme pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB), baik roda dua maupun empat. "Tekad kami semakin memberi kemudahan kepada masyarakat dalam urusan pembayaran pajak kendaraan bermotor, baik pajak tahunan maupun lima tahunan," ujar Iwan Saktiadi.

Iwan Saktiadi menambahkan jajarannya bertekad untuk meningkatkan dan mempermudah pelayanan, tetapi tetap berpegang pada asas profesionalisme dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing personel. Dengan demikian, apa yang dilakukan personel dalam melayani masyarakat harus proporsional dan profesional. Apabila terjadi penyimpangan, masyarakat dimohon untuk 'melaporkan' untuk nantinya ditindaklanjuti oleh masing-masing pejabat yang berkompeten.

Sebelumnya, Sabtu (20/3) bertempat di Aula Samsat Kota Yogyakarta dilakukan zoom meeting sertifikasi ISO WQA Indonesia 9001: 2015. Acara diikuti KPPD Samsat Kota, Ps Kasi STNK, Paur dan Pamin Sie STNK Subditregident Dirlantas Polda DIY, Jasa Raharja DIY, para Kasi Dispenda Samsat Kota, dan perwakilan staf pelayanan Dispenda dan personel Polri Sie STNK.

Pada kegiatan Sertifikasi ISI WQA 9001: 2015 oleh Ir Ayub Magendra dengan agenda open meeting (penyampaian KKP, Kasi STNK dan Jasa Raharja sesuai tupoksinya), diskusi dan pendalaman pada pelayanan Samsat, close meeting kegiatan penyampaian hasil penilaian dari WQA bahwa Samsat Kota Yogyakarta bersertifikasi ISO 9001: 2015 Periode Tahun 2021. **(Hrd)-f**

KEMENDAGRI UBAH REGULASI BANSOS DAERAH

Pemkot Upayakan Percepatan Pencairan Bantuan

YOGYA (KR) - Pemkot Yogya mengupayakan percepatan pencairan bantuan sosial (bansos) yang dialokasikan melalui APBD. Hal ini menyusul ada perubahan regulasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sehingga pemerintah di daerah perlu melakukan penyesuaian.

Sejumlah program bansos yang sedianya akan dicairkan awal bulan ini antara lain santunan kematian serta Bantuan Sosial Tunai (BST) APBD. Bantuan itu belum bisa direalisasikan karena masih dalam proses pembahasan regulasi.

"Kami harus sesuaikan regulasi dengan pemerintah pusat yang menjadi pijakan dalam melaksanakan program," jelas Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosakertrans) Kota Yogya

Maryustion Tonang, Minggu (21/3).

Perubahan regulasi dari Kemendagri terkait bansos ialah menyangkut organisasi perangkat daerah (OPD) teknis. Jika sebelumnya tersentralisir di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), kini didesentralisasi. Sehingga program bansos maupun hibah diserahkan ke masing-masing OPD teknis yang dulunya hanya sebagai penguna. Oleh karena itu, perlu ada peraturan walikota (perwal) yang lebih rinci.

Penyesuaian regulasi tersebut, imbuh Maryustion, guna memastikan aspek legalitas. Sehingga ukurannya bukan cepat atau lambat melainkan kepatuhan terhadap aturan agar tidak menimbulkan persoalan administrasi. "Regulasi harus kuat betul," tandasnya. **(Dhi)-f**

Di samping itu, penyesuaian regulasi juga tidak akan mempengaruhi nominal bantuan yang akan diberikan kepada penerima. Seperti santunan kematian bagi keluarga pemegang Kartu Menuju Sehat (KMS) ialah tetap Rp 3 juta tiap jenazah. Sedangkan BST APBD juga tetap sama yang digulirkan oleh pusat yakni Rp 1,2 juta bagi tiap penerima. Hanya teknisnya disesuaikan. Jika pemerintah pusat diberikan Rp 400.000 selama tiga bulan, sedangkan Kota Yogya Rp 200.000 selama enam bulan.

"Jadi tidak akan mengurangi atau merubah nominal karena sudah masuk dalam dokumen pelaksanaan anggaran. Hanya dari sisi payung hukum legalitas bansos hibah sana yang disesuaikan," imbuhnya.

(Dhi)-f

PERSIAPAN SEKOLAH TATAP MUKA

Aspek Keamanan Jadi Prioritas Utama

YOGYA (KR) - Kendati sekolah tatap muka ditargetkan mulai Juli mendatang, namun Kota Yogya terus berupaya mematangkan persiapan. Aspek keamanan menjadi salah satu prioritas utama di samping persetujuan dari orangtua siswa.

Menurut Walikota Yogya Haryadi Suyuti, ketika sekolah tatap muka sudah bergulir maka tidak ada lagi upaya uji coba. "Pada saatnya semua langsung berjalan. Tetapi memang bertahap, tidak langsung semua siswa masuk karena ada protokol yang wajib dipenuhi," jelasnya, Minggu (21/3).

Oleh karena itu, sepekan sebelum kegiatan belajar mengajar di sekolah diberlakukan kembali, maka pihak sekolah harus memastikan keamanan tempat. Mulai dari sarana pendukung

protokol kesehatan seperti wastafel maupun alat pengukur suhu hingga sirkulasi udara di dalam kelas. Satgas di tiap sekolah yang mengawal dan menegakkan protokol juga wajib sudah terbentuk.

Di samping itu, kesepakatan bersama antara guru, orangtua maupun organisasi intra siswa harus terjalinkan untuk saling menjaga suasana yang kondusif. "Orangtua tetap punya kendali penuh untuk mengizinkan putra-putrinya kembali belajar di sekolah. Kami pun memiliki tanggung jawab menjaga keamanan. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran," imbuh Haryadi.

Haryadi mengatakan, pihaknya juga telah menjalin koordinasi dengan satgas yang ada di wilayah. Sehingga ketika dalam pelaksanaannya, pihak ke-

mantren, koramil maupun polsek juga berhak untuk mengawasi jalannya pembelajaran agar sesuai dengan protokol. Monitoring dari unsur satgas wilayah tersebut dimulai sejak persiapan hingga pelaksanaannya nanti.

Dari aspek infrastruktur, SD hingga SMP di Kota Yogya sudah siap menggelar pembelajaran tatap muka. Apalagi mulai pekan ini jajaran guru hingga karyawan di seluruh lembaga pendidikan akan menjalani vaksinasi. Ditargetkan pada April mendatang semua guru dan karyawan sudah menyelesaikan vaksinasi dosis kedua. Sehingga harapannya kekebalan kelompok yang ada di lingkungan sekolah sudah berhasil terbentuk ketika pembelajaran tatap muka kembali digelar. **(Dhi)-f**

Pelaku UKM Didorong Miliki IUM

YOGYA (KR) - Para pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kota Yogya didorong memiliki Izin Usaha Mikro (IUM). Bukti legalitas tersebut sangat strategis untuk pengembangan usaha ke depan, termasuk dalam mengakses bantuan dari pemerintah.

Kepala Dinas Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperinkop UKM) Kota Yogya Tri Karyadi Riyanto, mengungkapkan pihaknya tengah mengintensifkan diseminasi untuk mendorong pelaku UKM segera memiliki IUM yang kini bisa diajukan secara daring. "Kami perkirakan masih ada sekitar 25 persen pelaku usaha kecil mikro di Kota Yogya yang belum memiliki izin usaha mikro," katanya, Minggu (21/3).

Menurutnya, terdapat sejumlah kendala yang menyebabkan pelaku usaha kecil menengah belum juga mengurus atau mengajukan permohonan izin usaha mikro. Di antaranya masih

gagap teknologi sehingga tidak bisa melakukan pendaftaran secara daring. Apalagi formulir permohonan izin usaha mikro yang harus diisi juga cukup banyak sehingga menyebabkan pelaku UKM kesulitan memasukkan data dan persyaratan yang harus dipenuhi.

"Kami melakukan diseminasi melalui wilayah. Harapannya, semakin banyak pelaku usaha yang memiliki kesadaran untuk mengurus IUM," imbuh Tri Karyadi.

Sedangkan keuntungan yang bisa diperoleh pelaku UKM apabila memiliki IUM pun cukup banyak. Seperti menjadi basis data untuk pemerintah, menaikkan status usaha dari informal menjadi formal, mendapat perlindungan hukum, dan membangun jaringan usaha yang lebih luas.

Selain itu, di masa pandemi Covid-19 pemerintah juga berencana kembali memberikan bantuan untuk pelaku UKM. Salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah memiliki IUM.

Meskipun demikian, lanjutnya, hingga saat ini pihaknya belum memperoleh informasi apapun terkait Bantuan Produktif untuk Usaha Mikro (BPUM) 2021. "Berdasarkan informasi se-

mentara, pendaftaran akan difasilitasi atau bahkan diusulkan oleh dinas terkait di tingkat kota atau kabupaten. Hanya, sampai sekarang belum ada kejelasan mengenai waktu pendaftarannya," urainya. **(Dhi)-f**

MULIA
AUTHORIZED MONEY CHANGER
www.muliamoneychanger.co.id

PERUBAHAN JAM OPERASIONAL MASA PANDEMI COVID-19
GRAND INNA MALOBORO HOTEL JL. MALOBORO 60 YOGYAKARTA
TELEP : 0274 - 547 688 DAN 563314
BUKA : 08.00 - 17.00 WIB

PLAZA AMBARRUKMO LOWER GROUND
TELEP : 4331272
BUKA : 11.00 - 17.00 WIB

JL. MARGO UTOMO NO.53 (MANGKUBUMI) YOGYAKARTA
TELEP : 4331272
BUKA : 11.00 - 17.00 WIB

TANGGAL 20/MAR/2021

CURRENCY	BELI/		JUAL
	BN	TC	
USD	14,325	-	14,575
EURO	17,100	-	17,350
AUD	11,075	-	11,275
GBP	19,800	-	20,300
CHF	15,350	-	15,650
SGD	10,675	-	11,025
JPY	131,000	-	135,000
MYR	3,425	-	3,625
SAR	3,725	-	4,025
YUAN	2,100	-	2,250

Catatan : Kurs sewaktu - waktu dapat berubah
Menerima hampir semua mata uang asing

RSPR Pertahankan Ruang Hijau

YOGYA (KR) - Rumah Sakit Panti Rapih (RSPR) menjadi salah satu rumah sakit yang tetap mempertahankan ruang terbuka hijau dalam bentuk taman. Ruang ini bisa berfungsi menyembuhkan atau mengandung nilai-nilai pengobatan (terapeutik) secara holistik.

"Sebelum pandemi, RSPR Yogya telah rutin menggelar *healing garden* supaya pasien dapat menikmati suasana di luar kamar perawatan. Ruang terbuka hijau juga memberi manfaat bagi keluarga pasien, staf dan pengunjung dapat menikmati," tutur Humas RSPR Maria Vita Puji, Sabtu (20/3) di sela mini workshop bersinergi dengan Kagama Orchids, komunitas Keluarga Alumni UGM yang memiliki perhatian pada angrek spesies Indonesia.

Workshop dibuka Direktur Pelayanan Kesehatan dan Infrastruktur RSPR Ir

Valentina Dwi Yuli Siswianti MKes, dihadiri Direktur Keperawatan Sr Yosefine Kusuma Hastuti CB dan diikuti 22 orang dari RSPR dan 15 orang dari Kagama Orchids. Sebagai narasumber ahli dan pendamping workshop dipimpin Ir Wahyu Wulandari MBA IAI AA. "Workshop berupa pemeliharaan tanaman angrek dengan pemanfaatan limbah dapur sebagai nutrisi," jelas Vita.

Kagama Orchids sebagai narasumber ahli memberikan materi cara rehabilitasi dan rekonstruksi tanaman angrek yang sudah ada di area rumah sakit, cara tanam, ikat dan peletakan tanaman angrek yang tepat.

"Serta pembuatan eco enzym dan pupuk organik cair dengan memanfaatkan air cucian beras, kulit bawang merah dan bawang putih, potongan buah dan sayur," ungkap Vita **(R-4)-f**

Dalam Dua Tahun, STIPRAM Tambah Enam Orang Doktor



KR-Istimewa

Enam Doktor baru STIPRAM lulusan UKSW Salatiga dalam 2 tahun terakhir memperkuat kualitas pendidikan STIPRAM.

Mahasiswa STIPRAM semester 2 program D3 Perhotelan siap meramaikan profesi Bartender dengan mengawali praktikum secara langsung di laboratorium kampus STIPRAM.



Jumat (19/3) mengatakan, penambahan doktor itu dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas STIPRAM dan menambah kepercayaan masyarakat di tengah suasana pendidikan yang saat ini masih berlangsung secara daring. "Selain itu kerjasama yang baik antara STIPRAM dan UKSW Salatiga telah membuktikan bahwa keberhasilan para dosen STIPRAM dalam meraih gelar Doktor adalah perjuangan yang sangat panjang ditengah-tengah pandemi Covid-19. Jadi suatu langkah yang tepat dan tidak perlu diragukan lagi, bahwa kualitas perkuliahan di STIPRAM layak dipertimbangkan dengan keberhasilan ini," kata Suhendroyono.

Di tengah pandemi Covid-19, STIPRAM mendapatkan kebahagiaan dengan bertambahnya 6 orang Doktor Baru dari UKSW Salatiga. Ke enam Doktor ini memiliki latar belakang manajemen karena S3 pariwisata di Indonesia masih langka. Ketua Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo (STIPRAM), Dr Suhendroyono dikampusnya Jl Ahmad Yani Ringroad Timur Banguntapan,

Dalam kesempatan itu Wakil Ketua STIPRAM, Dr Damiasih mengungkapkan, kuliah di bidang pariwisata seperti halnya dengan STIPRAM adalah pilihan tepat, karena masyarakat akan mendapatkan fasilitas yang lengkap, biaya yang sangat terjangkau dengan akreditasi prodi A dari BAN-PT adalah suatu indikator kualitas.

Tidak hanya itu, program studi yang dikelola telah diakui pemerintah yakni program D-3 Perhotelan, S-1 pariwisata, dan S2 Pariwisata. Perlu disyukuri pelan tapi pasti sektor pariwisata mulai menggeliat ditengah Covid-19. Hal ini menandakan bahwa pariwisata tetap menjadi andalan masyarakat dan pemerintah dalam menggerakkan perekonomian bangsa. Begitu pula halnya dengan STIPRAM, dengan didukung kualitas dosen yang professional di bidangnya, fasilitas yang lengkap, jaringan kerjasama yang tersebar diseluruh dunia, menandakan bahwa STIPRAM sudah go internasional.



KR-Istimewa

Lebih dari 100 mahasiswa STIPRAM berbagai semester dan berbagai prodi mengikuti kuliah bersama TAYLOR'S University Malaysia secara daring dengan tema pariwisata dan Covid-19.